



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5649);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPurbalingga.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUDadalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Purbalingga.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga.
13. Pengguna Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat PA-SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Purbalingga.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung SKPD, yang selanjutnya disingkat SPP LS SKPD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan SKPD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik mendapatkan kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perhitungan bantuan keuangan;
- b. penganggaran dalam APBD;
- c. pengajuan bantuan keuangan;
- d. verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan, penyaluran bantuan keuangan;
- e. penyaluran bantuan keuangan;

- f. penggunaan bantuan keuangan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. dualisme kepengurusan partai politik;

Pasal 2

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa uang.

BAB III PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik secara proporsional didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD.

BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja hibah, jenis belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (3) Rincian belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.
- (4) Besaran anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPA-SKPD untuk belanja hibah bantuan keuangan dalam bentuk uang.
- (3) Rincian belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan.
- (4) Penentuan besaran anggaran bantuan keuangan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengajuan bantuan keuangan partai politik kepada bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dengan kelengkapan dokumen permohonan bantuan keuangan yang terdiri atas:
 - a. proposal;
 - b. kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik.
 - c. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil serta bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) Format surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang bertanggungjawab secara formil dan materiil serta bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dibuat rangkap 3 (tiga) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

- (1) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat provinsi atau ditingkat kabupaten, pengajuan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

BAB VI
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penelitian dan pemeriksaan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. KPUD;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan keberadaan dan keabsahan partai politik yang mengajukan permohonan;
 - b. memastikan domisili/alamat sekretariat partai politik sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan;
 - c. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebelum dilaksanakan oleh penerima bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat melakukan klarifikasi, konfirmasi dan permintaan informasi kepada pemohon bantuan keuangan atau pihak-pihak lain untuk memastikan keberadaan dan keabsahan pemohon bantuan keuangan serta kelayakan kegiatan yang diajukan pemohon.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format Berita Acara Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik selaku PA-SKPD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
- (2) Ketua atau dengan sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik selaku PA-SKPD.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada DPA-SKPD.
- (2) Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui rekening kas umum daerah ke rekening partai politik penerima bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik selaku PA-SKPD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LSSKPD).
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan melalui PPK-SKPD, dilengkapi dengan :
 - a. persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) serta Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan;
 - c. draft surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - d. draft risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (3) PPK-SKPD melakukan pengujian kelengkapan dan substansi SPP-LS sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, PPK-SKPD menerbitkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik selaku PA-SKPD.

- (5) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD dengan dilampiri:
 - a. persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan dan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2);
 - b. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan keuangan;
 - c. risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan yang ditandatangani PA-SKPD.
- (6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah melakukan pengujian substantif dan formal atas SPM-LS yang diajukan oleh PA-SKPD.
- (7) Dokumen persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan arsip pengguna anggaran.
- (8) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VIII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik bagi pengurus partai politik dan masyarakat serta untuk operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan materi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;

- c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan;
- d. sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
- e. kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 18

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. *workshop*; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik dilakukan secara daring selama pandemi *Covid-19*.

Pasal 19

- (1) Selain bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Covid-19* kepada anggota partai politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan *disinfektan*.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai upaya pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Covid-19* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. keperluan ATK;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. Pengadaan barang inventaris kantor berupa furniture, komputer atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan; dan/atau
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dangiro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Pasal 21

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Covid-19* berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan *disinfektan*.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 22

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 23

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 25

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 27

Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 28

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian pemberian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh Bupati.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan partai politik.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 30

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan partai politik yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan partai politik yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, pemberian bantuan keuangan ditunda sampai dengan adanya penyelesaian secara internal oleh Partai Politik.
- (2) Dalam hal tidak dapat diselesaikannya dualisme kepengurusan partai politik dalam tahun anggaran berkenaan, bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat dicairkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 9



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN
KOP PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formal dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik serta bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah.

2. bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahunyang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DPP DPD/DPC PARTAI....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari iniTanggal Bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/Bupati/Walikota.....Nomor.....Tahun.....Tanggal....., telah melakukan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahunyang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah..... yang didasarkan pada hasil perolehan Suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun..... sebanyak.....suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK TAHUN

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Ketua | 1. |
| 2. Wakil Ketua | 2. |
| 3. Sekretaris | 3. |
| 4. Anggota | 4. |
| 5. Anggota | 5. |
| 6. Anggota | 6. |

7. Anggota

7.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bupati.....atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten/Kotaselanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten..... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut PihakKedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun.....kepada DPD/DPC Partai..... Kabupaten/Kota sejumlah Rp..... dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN.....melalui Rekening Bank DPD/DPCPartai.....Kabupaten/Kota.....

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah terima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA Ketua /DPC PARTAI.... (.....)	PIHAK PERTAMA BUPATI, (.....)
---	---

BENDAHARA,

(.....)

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI

TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal Bulan Tahun sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; e. Workshop; dan f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat d. Pengadaan barang inventaris antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotokopi; e. Sewa kantor; dan f. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan. g. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.			

	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon, Internet dan Listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat e. menyurat; dan/atau f. Media cetak dan elektronik			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip, yaitu: a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau b. Penyimpanan data manual			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor, yaitu: a. Pemeliharaan alat elektronik sekretariat; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.			
C	SALDO	Rp.		

Mengetahui,

Ketua,

Bendahara,

(.....)

(.....)

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 9